

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia dan Jepang telah menjalin hubungan diplomatik yang strategis sejak tahun 1958. Lewat hubungan diplomatik inilah telah dilakukan banyak kerja sama atau perjanjian yang mewakili kepentingan kedua negara di berbagai bidang. Salah satunya ada bidang ekonomi, dimana Indonesia dan Jepang telah menyepakati suatu perjanjian yang membawa mereka menuju suatu bentuk baru kerja sama ekonomi yang dikenal dengan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* atau yang biasa disebut dengan IJEPA.

IJEPA yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2008, ditandatangani oleh PM Shinzo Abe dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 20 Agustus 2007 di Jakarta (Axioma 2012, hlm. 26). Perjanjian yang termasuk dalam EPA (*Economic Partnership Agreement*) ini sebenarnya konsep yang masih baru dalam dunia perdagangan internasional, EPA berbeda dengan FTA karena cakupan EPA tidak hanya sektor perdagangan tetapi juga meliputi sektor jasa, investasi, migrasi, pariwisata, standarisasi peraturan dan hak kekayaan intelektual (Akbar *et al.* 2011, hlm. 58).

Dengan adanya IJEPA diharapkan akan menarik investasi langsung Jepang, terutama untuk memperkuat struktur industri nasional melalui peningkatan penguasaan teknologi dan membangun *regional network* di bidang manufaktur. Disepakatinya IJEPA ditujukan untuk mempererat dan mempromosikan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Jepang. Perjanjian kerjasama ekonomi IJEPA ini dilakukan karena bagi Indonesia, Jepang adalah sumber utama investasi dan bantuan pembangunan serta asistensi (*assistance*) bagi Indonesia. Sedangkan bagi Jepang, Indonesia merupakan salah satu sumber impor terbesar Jepang dan juga merupakan pasar ekspor yang signifikan untuk produk-produk Jepang (Kementerian Perdagangan, 2012).

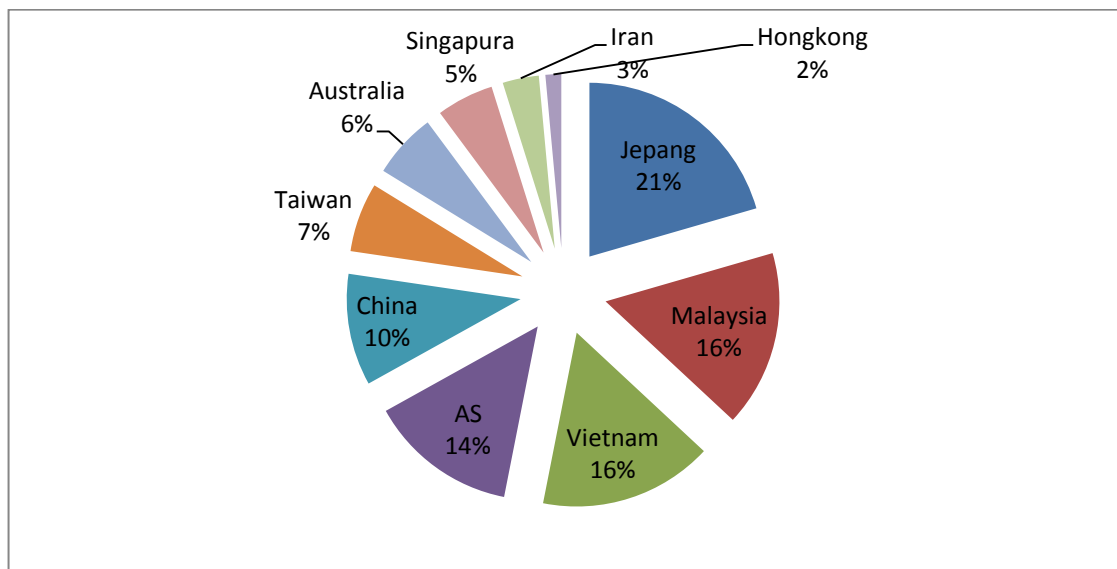
Lewat kerjasama IJEPA ini, Indonesia memiliki beberapa kepentingan. Yang pertama, IJEPA diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap 90% barang (produk agrikultur dan industri) yang Indonesia ekspor ke Jepang. Selain itu, IJEPA diharapkan dapat menyediakan kepastian akses pasar yang lebih besar lagi bagi produk-produk Indonesia dan menempatkan Indonesia di posisi yang sama dengan negara-negara pesaing lainnya yang sudah terlebih dahulu memiliki kesepakatan dengan Jepang. Indonesia juga bersikukuh untuk menarik lebih banyak bisnis dan investasi infrastruktur dari Jepang melalui IJEPA ini. Sedangkan kepentingan Jepang adalah bahwa IJEPA ini mampu mencakup 90% barang (produk agrikultur dan industri) yang Jepang ekspor ke Indonesia. Jepang juga menginginkan lingkungan bisnis bagi perusahaan-perusahaan Jepang yang berinvestasi di Indonesia akan meningkat di bawah kerjasama IJEPA ini. Selain itu, Jepang juga menginginkan transparansi implementasi dari IPR (*Intellectual Property Rights*), *customs procedures*, kebijakan persaingan, dan lainnya di Indonesia untuk lebih ditingkatkan.

Salah satu sektor yang disepakati dalam IJEPA adalah sektor industri pulp dan kertas. Industri pulp dan kertas adalah industri yang mengolah kayu sebagai bahan dasar untuk memproduksi pulp, kertas, papan, dan produk berbasis selulosa lainnya. Indonesia merupakan eksportir kertas terbesar ke-9 dan merupakan eksportir pulp terbesar ke-6 di dunia (FAO, 2013). Negara tujuan ekspor pulp dan kertas Indonesia adalah China, Jepang, Australia, Korea Selatan, dan beberapa negara Asia lainnya (Arifin 2007, hlm. 281). Sedangkan bagi Jepang, Indonesia merupakan importir pulp dan kertas terbesar kedua setelah China (Japan Paper Association, 2015).

Di sisi lain, kebutuhan kertas di Jepang sangatlah besar dan mendesak. Angka konsumsi pulp dan kertas Jepang sepanjang tahun 2010 saja adalah sebesar 27,9 juta ton di mana angka tersebut terdiri dari jumlah konsumsi pulp sebesar 37,4% dan jumlah konsumsi kertas sebesar 62,6% (Japan Paper Association, 2015). Angka yang besar ini disebabkan karena kertas merupakan penunjang penting bagi banyak aktivitas produksi di berbagai sektor industri dalam negeri Jepang. Tidak sedikit industri di Jepang yang lebih memilih untuk mengimpor pulp dan kertas karena harganya yang lebih murah jika dibandingkan bila

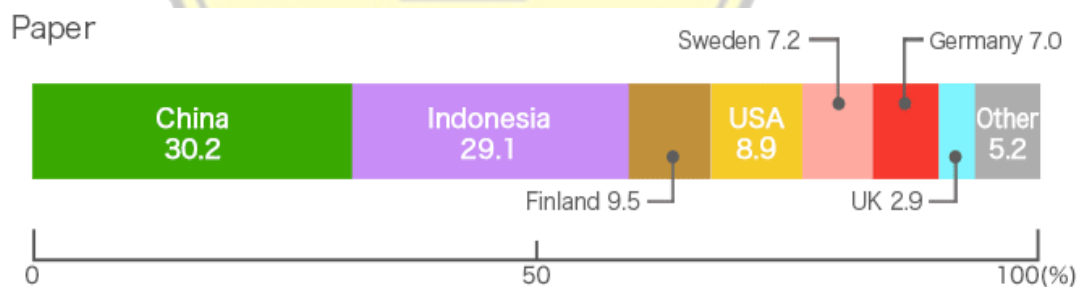
produksi sendiri. Angka konsumsi yang merepresentasikan angka kebutuhan pulp dan kertas Jepang yang besar menambah keyakinan bagi pemerintah dan para pengusaha Indonesia untuk memaksimalkan keuntungan lewat kerjasama IJEPA ini.

**Tabel 1.1** Ekspor Pulp dan Kertas Indonesia ke Negara Tujuan Utama (2015)



Sumber: BPS

**Tabel 1.2** Negara-negara Importir Kertas Jepang dari total 1,551,000 ton impor kertas Jepang (2015)



Sumber: Japan Paper Association

Berdasarkan Tabel 1.2 terlihat bahwa Indonesia memiliki pasar yang menjanjikan di Jepang. Indonesia berada di posisi kedua sebagai pengeksport kertas terbesar bagi Jepang. Jepang sendiri mengimpor kertas dari Indonesia sebesar 29.1% dari total impor sebesar 1,551,000 ton pada tahun 2015. Angka ini belum termasuk impor pulp Jepang dari Indonesia. Hal ini mengindikasikan

Indonesia sebagai eksportir pulp dan kertas yang besar bagi pasar Jepang. Oleh karena itu, potensi pasar yang besar bagi industri pulp dan kertas Indonesia di Jepang sudah seharusnya dimaksimalkan lewat kerjasama IJEPA.

Industri pulp dan kertas sebagai salah satu industri potensial dan penting bagi Indonesia juga ditetapkan sebagai salah satu sektor yang menerima penurunan tarif bea masuk di bawah skema kerjasama IJEPA. Potensi peningkatan ekspor pulp dan kertas ke Jepang cukup besar di bawah skema kerjasama IJEPA karena Jepang sendiri merupakan negara tujuan utama ekspor pulp dan kertas Indonesia dan Indonesia sudah sejak lama merupakan importir pulp dan kertas terbesar bagi Jepang.

Selain itu, potensi pasar pulp dan kertas di Jepang juga menjanjikan. Indonesia mengharapkan adanya peningkatan total ekspor pulp dan kertas dengan diturunkannya tarif bea masuk serta akses pasar yang mudah dengan dilaksanakannya kerjasama IJEPA ini. Bagaimana pun juga, sektor industri pulp dan kertas merupakan salah satu komoditas ekspor penting yang menyumbangkan pendapatan negara terbesar bagi Indonesia.

Kemudian, sebagai hasil dari implementasi kerjasama IJEPA, telah terjadi berbagai hal yang tidak terduga. Perdagangan Indonesia di bawah skema IJEPA justru mengalami kemunduran meskipun secara nilai mengalami peningkatan. Hal ini berbanding terbalik dengan perdagangan Jepang yang perlahan-lahan menunjukkan peningkatan secara signifikan. Sebagai salah satu komponen yang merasakan tidak maksimalnya keuntungan yang didapatkan bagi perdagangan Indonesia di bawah skema kerjasama IJEPA ini, ekspor industri pulp dan kertas juga merupakan salah satu yang justru mengalami penurunan. Sejak diimplementasikannya IJEPA, memang terjadi peningkatan total ekspor dibandingkan sebelum IJEPA diterapkan, tetapi sejak tahun 2013 terjadi penurunan total ekspor pulp dan kertas Indonesia ke Jepang. Hal ini justru berbanding terbalik dengan jumlah impor pulp dan kertas dari Jepang yang sedikit demi sedikit mengalami peningkatan.

Keadaan yang berbanding terbalik ini dapat terlihat jelas pada tahun 2013, dimana nilai impor pulp dan kertas Jepang mengalami lonjakan sebesar US\$8,772,900 (lihat Tabel 1.6). Di sisi lain, pada periode yang sama, ekspor pulp

dan kertas Indonesia ke Jepang justru mengalami penurunan yang sangat signifikan dimana total nilai ekspor pulp dan kertas Indonesia turun sebesar US\$158,647,799 dan terus menurun hingga tahun 2015 (lihat Tabel 1.5).

**Tabel 1.5** Ekspor Komoditas Pulp dan Kertas Indonesia ke Jepang 2007-2015 (US\$)

Komoditas	2007	2008	2009	2010	2011
Pulp dan Kertas	343,942,911	447,330,015	455,345,402	534,788,949	665,895,666
	2012	2013	2014	2015	Trend 2012-2015
	695.861.756	537.213.957	472.714.579	470.072.116	-12,23%

**Tabel 1.6** Impor Komoditas Pulp dan Kertas Indonesia dari Jepang 2012-2015 (US\$)

Komoditas	2012	2013	2014	2015	Trend
Pulp dan Kertas	120.732.380	129.505.280	124.768.534	110.251.279	-3,05%

*Sumber: Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian, 2017*

Berbeda dengan data total ekspor pada tahun 2013 hingga 2015, total nilai ekspor pulp dan kertas Indonesia ke Jepang pada periode sebelum diimplementasikannya IJEPa hingga tahun 2012 seperti yang tertera pada Tabel 1.5, memang terlihat adanya peningkatan. Terutama pada tahun 2008 dimana peningkatan terjadi hingga US\$100.000.000 dibandingkan dengan tahun 2007 dan terus meningkat hingga tahun 2012. Hanya saja terlihat jelas bahwa sejak tahun 2013 mulai terjadi penurunan.

Fakta penurunan ekspor ini diperkuat dengan hasil studi CSIS (Center for Strategic and International Studies) yang menyatakan bahwa pulp dan kertas Indonesia merupakan salah satu komoditas yang gagal meningkatkan ekspornya ke Jepang di bawah skema IJEPa di samping komoditas tekstil, alas kaki, makanan olahan, dan produk-produk ikan (Yulisman 2015). Total ekspor pulp dan kertas yang menurun saat masih dinaungi oleh skema kerjasama IJEPa tentu tidak



diharapkan oleh pihak eksportir Indonesia. Dengan diturunkannya atau dihapuskannya tarif bea masuk produk impor seharusnya dapat menjadi kesempatan bagi eksportir pulp dan kertas untuk mendapatkan akses pasar Jepang yang lebih mudah. Akan tetapi, masih banyak kendala yang dialami oleh para eksportir untuk memasarkan produk-produknya.

Pemerintah Indonesia sendiri telah berupaya untuk menindaklanjutinya dengan mengajak pihak Jepang untuk membuat kajian ulang mengenai kerjasama ini. Akan tetapi, karena berbagai alasan, keputusan mengenai kelanjutan kerjasama ini masih belum jelas. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari pihak Kementerian Perindustrian yang mengungkapkan negoisasi *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* atau IJEPA belum menemukan titik temu hingga saat ini dan pihaknya juga menyatakan bahwa pihak Jepang terus menunda pembahasan mengenai kelanjutan dari kerjasama ini. Bahkan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Haris Munandar, menyatakan bahwa pada tahun ini belum terdapat sinyal tentang kelanjutan pembahasan kesepakatan IJEPA (Kahfi 2016). Hal ini membuktikan bahwa Indonesia pun masih belum mendapatkan kejelasan dari Jepang dan tidak mampu menyuarkan protesnya kepada Jepang yang tentu memiliki peran serta pengaruh yang lebih kuat.

## **I.2 Fokus Permasalahan**

Jadi, fakta-fakta yang menunjukkan penurunan total ekspor pulp dan kertas di bawah skema kerjasama IJEPA membuktikan bahwa Indonesia masih belum mampu memperoleh keuntungan dari kerjasama ini di sektor perdagangan secara maksimal. Selanjutnya, perlu diteliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor penyebab penurunan total ekspor sektor industri pulp dan kertas Indonesia ke Jepang di bawah skema kerjasama IJEPA. Oleh karena itu, Penulis mengambil sebuah perumusan masalah yang mempertanyakan; **Mengapa kinerja ekspor pulp dan kertas Indonesia ke Jepang mengalami penurunan di bawah skema kerjasama IJEPA pada periode 2013-2015?**

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan skema kerjasama Indonesia-Jepang dalam IJEPA di sektor perdagangan khususnya pada industri pulp dan kertas;
- b. Menganalisa penyebab menurunnya kinerja ekspor pulp dan kertas Indonesia ke Jepang pada periode 2013-2015 di bawah skema kerjasama IJEPA.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi disiplin ilmu Hubungan Internasional terutama yang berkaitan dengan penyebab menurunnya ekspor pulp dan kertas Indonesia ke Jepang di bawah skema IJEPA.

- a. Secara Akademis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan informasi maupun data dalam studi Hubungan Internasional yang memiliki kaitan dengan penyebab menurunnya ekspor pulp dan kertas Indonesia ke Jepang di bawah skema kerjasama IJEPA.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan maupun referensi untuk berbagai karya ilmiah yang berkaitan dan menjadi contoh kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

### **I.5 Tinjauan Kepustakaan**

Terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa Indonesia belum diuntungkan lewat kerjasama IJEPA dengan Jepang dan berpendapat bahwa kerjasama ini belum memberikan manfaat untuk Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh neraca perdagangan, khususnya di sektor nonmigas, yang defisit terhadap Jepang pasca diimplementasikannya IJEPA, meskipun terdapat peningkatan nilai ekspor tetapi nilainya masih jauh dibandingkan dengan nilai impor dari Jepang. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai kerjasama IJEPA ini kepada para pedagang atau eksportir Indonesia serta sulitnya produk

ekspor Indonesia untuk masuk ke pasar Jepang menjadi alasan mengapa kerjasama ini belum membuahkan hasil yang memuaskan bagi Indonesia.

Yang pertama adalah artikel terbitan tahun 2012 milik Aziza R. Salam, Sefiani Rayadiani, dan Immanuel Lingga yang berjudul “IJ-EPA dan Implikasinya Terhadap Kinerja Perdagangan Indonesia-Jepang” dalam Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 6 No. 1. Artikel ini menyimpulkan bahwa dari segi perdagangan bilateral, kesepakatan perdagangan bebas IJ-EPA berdampak pada perubahan pola impor Indonesia dari Jepang dimana terdapat beberapa produk yang mengalami lonjakan, seperti produk Kendaraan Bermotor dan Mesin Disel. Sebaliknya, implementasi IJ-EPA justru tidak memiliki dampak yang berarti terhadap pola ekspor Indonesia ke Jepang. Menurut data, meskipun ekspor non-migas Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun selama periode 2004-2010, namun pada tahun 2008 dan 2010 nilainya tidak dapat mengimbangi impor non-migas Indonesia dari Jepang. Impor non-migas Indonesia dari Jepang pada tahun 2008 meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya sedangkan ekspornya hanya mampu tumbuh 5%. Selain itu, berdasarkan hasil analisa data statistik dan survey yang memperoleh kesimpulan bahwa pemanfaatan SKA (Surat Keterangan Asal) Form IJEPA, yang digunakan untuk mensertifikasi asal barang yang diperdagangkan, ternyata relatif lebih rendah dibandingkan dengan kesepakatan perdagangan bebas lainnya yang telah ditandatangani dan diimplementasikan di Indonesia. Ketidakefektifan yang terjadi dikarenakan beberapa faktor antara lain: masih adanya penggunaan Form A dalam ekspor ke Jepang, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di berbagai Intansi Penerbit SKA (IPSKA), keengganan pencantuman struktur biaya dalam SKA Form IJ-EPA, dan kurangnya sosialisasi mengenai fasilitas IJ-EPA. Ketidaktahuan mengenai fasilitasi dalam IJEPA disebabkan oleh ketidakpedulian para pelaku usaha sebagai eksportir akan manfaat tarif preferensi IJ-EPA. Manfaat keringanan tarif bea masuk preferensi IJ-EPA justru lebih banyak dinikmati oleh pihak pembeli atau importir dari Jepang.

Artikel ini menyoroti pada bagaimana implementasi IJEPA tidak membawa dampak yang berarti terhadap perubahan pola ekspor Indonesia ke Jepang, sebaliknya, implementasi kerjasama ini justru berdampak cukup



signifikan bagi pola impor Indonesia dari Jepang yang menyebabkan defisit neraca perdagangan. Artikel ini mengindikasikan bahwa masih ada yang kurang dalam implementasi kerjasama IJEPA sehingga belum mampu membawa keuntungan bagi sektor perdagangan Indonesia, khususnya di sektor nonmigas yang secara prihatin justru mengalami defisit setelah kerjasama ini diimplementasikan. Selain itu, artikel ini juga menyoroiti bagaimana salah satu yang menghambat perkembangan kinerja ekspor Indonesia adalah kurang dimanfaatkannya fasilitasi di bawah naungan kerjasama IJEPA seperti fasilitas SKA Form IJEPA oleh para eksportir yang sebenarnya dapat membantu para eksportir dalam memasarkan dagangannya di Jepang. Artikel ini membantu Penulis dengan menyediakan sebuah data yang menyatakan belum maksimalnya pemanfaatan fasilitas IJEPA yang mengakibatkan belum maksimalnya akses pasar para eksportir untuk mengirim dan memasarkan produknya ke pasar Jepang dan berujung pada tidak maksimalnya total ekspor Indonesia ke Jepang.

Berkaitan dengan penelitian yang mengkaji tentang defisitnya perdagangan migas dan nonmigas Indonesia pasca implementasi IJEPA, adalah artikel milik Rizky Wendi Firdaus yang berjudul “Implementasi *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* terhadap Defisitnya Neraca Perdagangan Sektor Non-Migas Indonesia-Jepang 2008-2012” dalam Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 3, No.1 Tahun 2014. Artikel ini menyoroiti isu defisitnya perdagangan Indonesia di sektor non migas paska diterapkannya IJEPA tahun 2008-2012. Jadi, dalam artikel ini ditampilkan grafik perdagangan neraca perdagangan sektor nonmigas Indonesia terhadap Jepang yang menunjukkan bahwa mulai tahun 2008 hingga tahun 2012 telah terjadi defisit walau masih terjadi surplus pada tahun 2009. Akan tetapi, defisit dari tahun 2008 dan tahun 2010 hingga 2012 terus mengalami peningkatan sehingga menimbulkan pertanyaan penelitian; ‘mengapa perdagangan Indonesia sektor non migas mengalami defisit setelah diterapkannya IJEPA tahun 2008-2012?’. Menurut artikel ini, salah satu faktor yang menyebabkan defisit perdagangan nonmigas tersebut adalah akses pasar Jepang yang sulit. Hal ini disebabkan oleh standarisasi pasar Jepang yang tinggi dan pemikiran *Koukusan Daiichi* masyarakat Jepang.

Artikel milik Rizky ini membantu Penulis untuk menyediakan data-data alasan lesunya perdagangan sektor nonmigas di pasar Jepang di bawah skema kerjasama IJEPA. Yang membedakan artikel ini dengan penelitian Penulis adalah bahwa penelitian hanya menjelaskan sektor nonmigas secara umum, sedangkan Penulis fokus pada industri pulp dan kertas. Penulis dapat menjadikan artikel Rizky sebagai salah satu referensi mengenai penyebab turunnya ekspor pulp dan kertas Indonesia ke Jepang.

Selanjutnya adalah mengenai industri pulp dan kertas yang merupakan salah satu komoditas penting dan potensial Indonesia yang menjadi fokus dari penelitian ini. Terdapat artikel dari Ni Made Ayu Krisna Cahyadi dan Made Sukarsa yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ekspor Kertas dan Barang Berbahan Kertas di Indonesia Tahun 1988-2012” diterbitkan dalam E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol.4 , No. 1 pada tahun 2014. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kurs dollar Amerika, produksi, dan tuduhan dumping terhadap ekspor kertas dan barang berbahan kertas Indonesia. Hasil analisis dari artikel ini menunjukkan bahwa kurs dollar Amerika, produksi, dan tuduhan dumping berpengaruh signifikan terhadap ekspor kertas dan barang berbahan kertas. Kurs dollar Amerika dan produksi berpengaruh positif dan signifikan sedangkan tuduhan dumping berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ekspor kertas dan barang berbahan kertas Indonesia pada periode 1988-2012. Sedangkan variabel yang paling berpengaruh terhadap ekspor kertas dan barang berbahan kertas periode 1988-2012 adalah faktor produksi.

Artikel ini meneliti mengenai faktor kurs dollar Amerika, faktor produksi dan faktor tuduhan dumping sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor kertas dan barang berbahan kertas pada periode 1988-2012. Artikel ini dapat Penulis jadikan sebagai salah satu referensi alasan penurunan ekspor pulp dan kertas Indonesia ke Jepang di bawah skema IJEPA setelah dikaji dan disesuaikan dengan konteks penelitian Penulis. Yang menjadi perbedaan artikel ini dengan penelitian Penulis tentunya adalah objek negara dan skema kerjasama yang menaungi kegiatan ekspor-impor pulp dan kertas ini.

Dan yang terakhir adalah artikel milik F. Gunarwan Suratmo yang berjudul “Prospek dan Tantangan Pengembangan Industri Pulp dan Kertas Indonesia dalam Era Ekolabeling dan Otonomi Daerah” diterbitkan dalam Jurnal Manajemen Hutan Tropika Vol. 6, No. 2 pada tahun 2000. Artikel ini menitikberatkan pada tantangan-tantangan yang dihadapi pengembangan agribisnis pulp dan kertas terutama dalam pemasaran hasil industri dan kertas di dalam dan luar negeri yang berupa permintaan konsumen (pengimpor) untuk menjalankan pelabelan dari bahan baku, dan dalam hal ini adalah ekolabeling. Hambatan perdagangan internasional dapat berupa aksi pemboikotan (*ban*). Dan untuk menghadapi hambatan dengan adanya kesepakatan-kesepakatan internasional, pemerintah, pengusaha dan masyarakat perlu menyiapkan diri dan mengantisipasi permasalahan yang akan menggagalkan pembangunan agribisnis industri pulp dan kertas.

Artikel ini menyatakan bahwa selama pengelolaan hutan produksi dan industri pulp dan kertas dalam mengikuti kriteria dari sistem manajemen lingkungan maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Usaha negatif dari perdagangan bebas internasional yang dapat menimbulkan perang dagang perlu diantisipasi oleh pemerintah dan pengusaha. Selain itu, artikel ini menyarankan perlunya *capacity building* yang terkait di tingkat II (kabupaten) yang dipegang tenaga yang profesional dan berdedikasi tinggi. Dan yang paling penting adalah pembentukan lembaga ekolabeling Indonesia akan lebih menguntungkan dibandingkan lembaga ekolabeling dan asesor yang datang dari luar negeri.

Artikel milik Gunarwan ini menggambarkan situasi industri pulp dan kertas serta kondisi pasar internasional pada era ekolabeling yang hingga saat ini menjadi standar bagi hampir seluruh negara di dunia terhadap produk impor khususnya pulp dan kertas. Artikel ini dapat Penulis jadikan referensi bagi pembahasan mengenai industri pulp dan kertas Indonesia. Yang membedakan artikel ini dengan penelitian Penulis adalah periodenya serta objek negaranya di bawah skema sebuah kerjasama ekonomi.

## I.6 Kerangka Pemikiran

### I.6.1 Konsep *Free Trade* (Perdagangan Bebas)

Pertama, Penulis menggunakan konsep perdagangan bebas. Perdagangan bebas (*free trade*) adalah pusat dari praktik globalisasi ekonomi saat ini, yang mensyaratkan pelonggaran pergerakan manusia, barang, jasa, uang, dan pemikiran melewati perbatasan negara (Hastedt *et al.* 2014). Perdagangan bebas menganjurkan penggunaan kekuatan pemerintah lewat tindakan-tindakan seperti penghentian pajak, tarif, dan subsidi untuk mempromosikan dan melindungi sektor-sektor kunci perekonomian dari kompetisi asing serta memberikan perusahaan-perusahaan domestik keuntungan dalam berkompetisi pada pasar asing.

“... *advocates of free trade stress its ability to efficiently allocate resources and its potential for creating positive and peaceful relationships between countries, supporters of strategic trade policies emphasize the existence of competition among countries and the insecurity that this creates.*” (Hastedt *et al.* 2014)

Perdagangan bebas memberi peluang bagi masing-masing negara untuk meraih keuntungan melalui spesialisasi produk komoditas yang menjadi keunggulan masing-masing negara. Tokoh utama perdagangan bebas dalam perspektif liberal adalah Adam Smith. Para pemikir liberal berpendapat bahwa keterlibatan negara di dalam sistem perdagangan bebas hanya diperlukan jika untuk pencapaian kesejahteraan bersama (Hadiwinata 2002, hlm. 61). Hal tersebut karena perdagangan bebas akan sendirinya menciptakan sistem pembagian kerja internasional (*international division of labour*) yang saling menguntungkan karena setiap negara akan berkonsentrasi pada sektor-sektor yang dianggapnya paling menguntungkan.

Kaum liberal memiliki sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mengusahakan suatu masyarakat yang dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu, pembatasan kekuasaan, khususnya dari pemerintah dan agama, penegak umum, pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi (*private enterprise*) yang



relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan, yang di dalamnya hak-hak kaum minoritas dijamin. Dalam masyarakat modern, kaum liberal lebih menyukai demokrasi liberal, dimana semua warga negara mempunyai hak yang sederajat oleh hukum dan mempunyai kesempatan yang sama untuk berhasil dalam segala bidang usaha bisnisnya.

Perdagangan bebas merupakan salah satu tindakan damai untuk meraih kemakmuran negara karena perekonomian masing-masing negara akan menjadi lebih baik daripada jika negara tersebut hanya mengejar nasionalisme dan mencukupi kebutuhan sendiri (otarki) (Burchill *et al.* 2005, hlm. 63). Perdagangan bebas juga menghilangkan perbedaan antara negara dan individu dimana pun dalam suatu masyarakat. Perdagangan bebas dapat memperluas jaringan dan meningkatkan level kesepahaman antar manusia di dunia serta mendorong terciptanya persahabatan dan kesepahaman internasional. Hanya perdagangan bebas yang akan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan kompetisi yang akan mempromosikan cara paling efisien dalam pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal (*Ibid*, hlm. 73).

*“Arguments for free trade are still powerfully made on the grounds of economic efficiency and as the only way of integrating the developing world into the wider global economy.” (Ibid, hlm. 76)*

Jadi, yang masih menjadi poin unggulan konsep perdagangan bebas adalah bahwa memang sudah menjadi harapan setiap negara (khususnya negara berkembang) untuk mendapatkan keuntungan dengan berintegrasi dengan negara-negara yang lebih ‘mapan’ secara ekonomi. Hingga saat ini, hampir seluruh negara di dunia mengimplementasikan konsep perdagangan bebas, baik secara bilateral maupun regional. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan keunggulan masing-masing negara dengan harapan akan membuka lebih banyak kesempatan baru bagi sektor perdagangan mereka.

Dalam kasus ini, IJEPA merupakan salah satu implikasi dari perdagangan bebas dimana Indonesia dan Jepang sepakat untuk menurunkan tarif ekspor dan impor bagi barang-barang dari kedua Negara untuk memasuki pasarnya. Perdagangan bebas sejatinya memberikan kemudahan perdagangan bagi kedua



Negara yang menyepakati dengan menghapus hambatan-hambatan demi keuntungan bersama.

Akan tetapi pada realitanya, seperti yang dijabarkan oleh konsep di atas, kerjasama IJEPA ini masih menciptakan hambatan seperti standarisasi dan lain-lain. Jadi, IJEPA ini belum sepenuhnya menerapkan konsep perdagangan bebas yang seharusnya. Sebagai hasilnya, keuntungan yang didapatkan dari skema kerjasama ini masih berat sebelah. Oleh karena itu, konsep ini digunakan Penulis untuk melihat ketidaksesuaian implementasi atau realita IJEPA dengan keharusan-keharusan yang disyaratkan dalam konsep *free trade* ini.

### **I.6.2 Konsep Kerjasama Perdagangan Bebas / *Free Trade Agreement* (FTA)**

Selanjutnya, Penulis menggunakan konsep kesepakatan perdagangan bebas (*Free Trade Agreement/FTA*). *Free Trade Agreement* adalah sebuah perjanjian antar dua negara atau lebih untuk menghapus tarif, preferensi, dan kuota impor bagi seluruh (atau kebanyakan) barang antara negara-negara tersebut (Grieco *et al.* 2014, hlm. 276). Dalam satu dekade terakhir ini, tren kerjasama ekonomi global semakin terfragmentasi ke dalam jaringan blok perdagangan dengan bingkai *free trade agreement* (FTA) secara bilateral maupun regional.

*“An FTA is an arrangement between two or more countries removing all, or substantially all, barriers to trade between or among them. The arrangement may be bilateral, i.e., between two countries, such as US-Israel Free Trade Agreement and US-Bahrain Free Trade Agreement. Or an FTA may be multilateral.”* (Bhala 2007, hlm. 642).

Sejak dirasakan kurang efektifnya kerjasama multilateral, negara-negara di dunia mulai beralih pada negosiasi kerjasama perdagangan dari multilateral ke regional dan bilateral dalam kerangka *Free Trade Agreement* (FTA). Salah satu alasan yang menjadi pertimbangan suatu negara untuk melakukan *Free Trade Agreement* (FTA) adalah kekhawatiran kehilangan pangsa pasar yaitu kemungkinan beralihnya mitra dagang ke negara lain yang telah melakukan FTA dengan negara mitra tersebut (Arifin 2007, hlm. 209). Hal ini dapat terjadi karena anggapan bahwa daya tarik suatu negara akan meningkat dengan menjadi anggota suatu FTA atau RTA (*Regional Trade Agreement*) yang akan mendorong antara

lain terjadinya *trade creation*.<sup>1</sup> Dinamika kerjasama dalam skema FTA tidak lagi murni sebagai sarana liberalisasi perdagangan, namun sudah berkembang menjadi bagian dari lobi kepentingan ekonomi dan politik dalam konteks yang lebih luas.

Dalam konsep FTA, Perjanjian Kemitraan Ekonomi atau *Economic Partnership Agreement* (EPA) merupakan bagian yang menjadi skema kerjasama utama dalam penelitian ini. Konsep *Economic Partnership Agreement* (EPA) mulai digunakan dalam Perjanjian Internasional dan mulai menjadi tren perdagangan ketika konsep tersebut diusung dalam jalinan kerjasama ekonomi antara Uni Eropa dengan negara-negara di Afrika, Kepulauan Karibia, dan Pasifik (Lombaerde & Puri 2009, hlm. 125). EPA sendiri kemudian menjadi sebuah perjanjian kompleks yang menuntut terjadinya integrasi ekonomi yang melibatkan partisipasi secara luas, yakni tidak hanya pada lingkup makro, kerjasama ini juga melibatkan seluruh komponen ekonomi di sektor mikro di kedua belah pihak.

Dalam tulisannya, Lombaerde dan Puri (2009, hlm. 125-126) menjelaskan bahwa EPA memiliki empat prinsip dasar utama yaitu *Partnership, Regional Integration, Development, WTO-compatible*. Prinsip pertama, *partnership* (kemitraan) adalah bahwa EPA menyiratkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak istimewa yang sama bagi kedua belah pihak. Prinsip kedua, *South-South integration* adalah bahwa integrasi regional merupakan jantung dari perjanjian yang berlangsung. Dalam IJEPA, prinsip ini merupakan sebuah perwujudan hubungan bilateral antara dua negara dengan kawasan yang berbeda mencoba berintegrasi secara ekonomi. Prinsip ketiga, prinsip *development* (pembangunan) yang berarti EPA adalah instrumen untuk pembangunan, dimana '*development dimension*' merupakan pusat atau fokus dari EPA untuk membasmi kemiskinan di negara-negara mitra. Dan prinsip yang terakhir, *WTO-compatible* berarti bahwa EPA akan dibangun berdasarkan aturan-aturan dari WTO, dan jika memungkinkan melampaui WTO. Mereka akan menentukan hubungan perdagangan bilateral yang dimaksudkan untuk mengurangi semua hambatan praktik vertikal untuk perdagangan antara kedua belah pihak.

---

<sup>1</sup> *Trade creation* artinya *free trade area* akan menciptakan perdagangan yang sebelumnya belum pernah terjadi. Sebagai hasilnya, supply terjadi dari produsen yang lebih efisien dan pada semua kasus perdagangan *trade creation* akan meningkatkan kesejahteraan suatu negara.

Perkembangan dunia yang semakin modern, menjadikan EPA sebuah sarana untuk terlibat dalam kompetisi perdagangan sekaligus sebagai pertahanan terhadap rintangan-rintangan akibat semakin rumitnya perubahan lingkungan perekonomian internasional.

*“EPAs are supposed to be asymmetrical trade agreements covering not only trade in goods and services but also ‘behind the border’ issues, such as competition, government procurement, intellectual property, and trade facilitation. This type of ‘comprehensive trade agreement’ is supposed to decrease transaction costs for companies, improve transparency and help to establish bigger markets.”* (Asche 2008, hlm. 20)

EPA sendiri merupakan sebuah tindakan perjanjian yang lebih komprehensif apabila dibandingkan dengan FTA. EPA bertujuan selain untuk memfasilitasi dua atau lebih negara yang ingin memiliki sebuah sistem perekonomian yang saling terkait dan bersinggungan supaya lebih efisien, dimana FTA yang telah diterapkan WTO ternyata tidak cukup mampu dalam memfasilitasinya. EPA sendiri ialah sebuah perjanjian internasional bagi penghapusan tarif yang dibebankan antara negara atau kawasan dan untuk menghapus peraturan dalam bidang penanaman modal asing pada bidang jasa perdagangan.

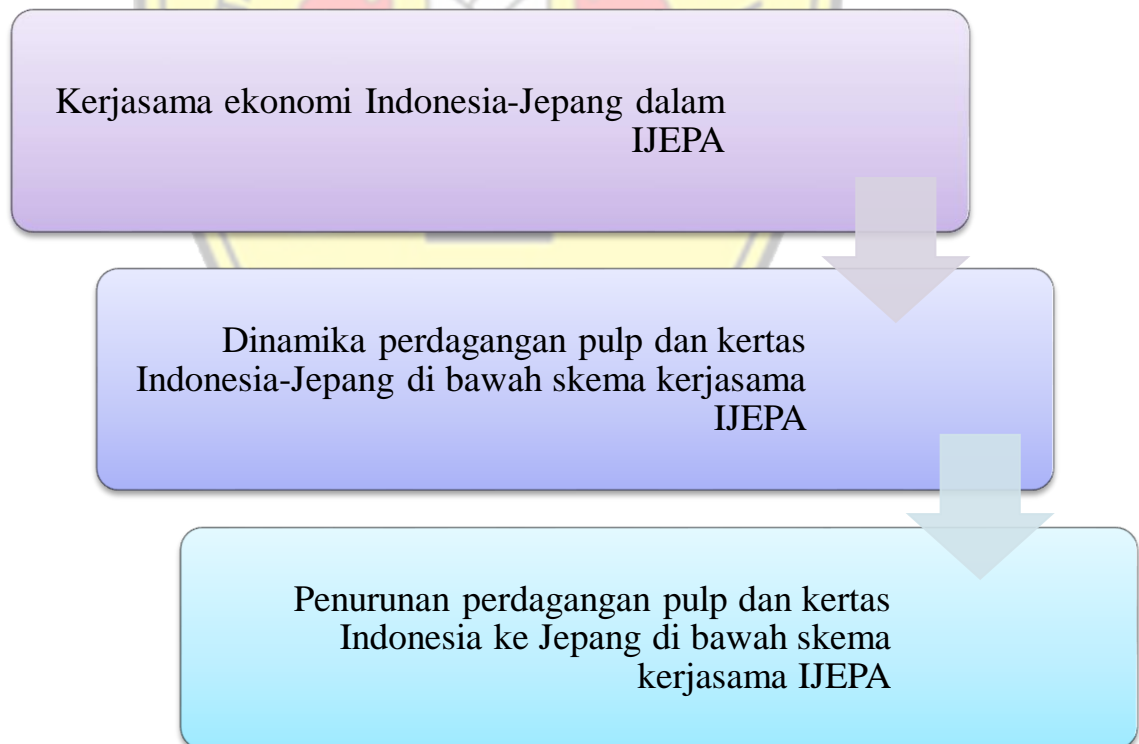
Dalam konteks IJEPA sendiri, EPA (*Economic Partnership Agreement/ Perjanjian Kerjasama Ekonomi*) adalah perjanjian internasional untuk menderegulasi peraturan-peraturan bagi penanaman modal dan pengendalian imigrasi sebagai tambahan dari isi kesepakatan (JETRO, 2009). EPA disebut sebagai perjanjian yang memperkokoh kerjasama ekonomi dengan negara dan kawasan lain di berbagai bidang dengan pembebasan/memfasilitasi Bergeraknya sumber daya manusia, barang dan modal, berpusat pada FTA.

IJEPA menerapkan tiga pilar, yakni liberalisasi (*liberalization*), fasilitasi (*facilitation*), dan kerjasama (*cooperation*). Liberalisasi adalah pengurangan atau penghapusan *border* dan hambatan dagang, fasilitasi adalah peningkatan kerjasama dan transparansi di berbagai area seperti IPR (*Intellectual Property Rights*), *customs procedures*, kebijakan persaingan, dan lain-lain, serta kerjasama yang merupakan fitur khusus dari EPA yang menyatakan bahwa Indonesia dan Jepang telah menyetujui kerjasama di banyak sektor di luar sektor perdagangan

dan bahwa Jepang akan memasukkan sumber-sumber kokoh yang dibutuhkan untuk kegiatan *capacity-building* bagi Indonesia sehingga membuka peluang akses pasar lebih luas.

IJEPA menggunakan skema EPA sebagai dasar kesepakatannya. Pertimbangan cakupan kerjasama yang lebih luas hingga melibatkan pihak-pihak dan bidang yang lebih kecil, membuat Indonesia dan Jepang berkeyakinan bahwa EPA adalah skema yang paling efektif dan menguntungkan. Meskipun Jepang sendiri sudah melaksanakan kerjasama dengan negara-negara ASEAN, kesepakatan EPA antara Indonesia dan Jepang diharapkan lebih membantu kedua negara menuju kesepakatan yang lebih intensif dan efektif. Konsep EPA ini digunakan Penulis untuk melihat bahwa skema EPA yang dilakukan Indonesia dan Jepang belum maksimal, di mana dalam implementasinya masih menguntungkan salah satu pihak saja.

### **I.7 Alur Pemikiran**



## I.8 Metode Penelitian

### I.8.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu mekanisme dan proses dalam suatu penelitian dimana peneliti memulai berpikir secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial, melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamatinya tersebut (Bungin 2008, hlm. 6). Penelitian ini menganalisa berdasarkan fakta lapangan mengenai penurunan ekspor pulp dan kertas Indonesia ke Jepang di bawah skema IJEPA yang kemudian dihubungkan dengan teori yang berkaitan.

### I.8.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Metode deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang (Sevilla *et al.* 1993, hlm. 71). Penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai taraf deskripsi yaitu menganalisa dan menyajikan data secara sistemik, sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan situasi faktual mengenai penurunan ekspor pulp dan kertas Indonesia ke Jepang di bawah skema IJEPA yang seharusnya mampu menaikkan total ekspor pulp dan kertas Indonesia ke pasar Jepang serta analisa mengenai penyebab-penyebab penurunan tersebut.

### I.8.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pertama, data primer yang berkaitan dengan kerjasama antara Indonesia-Jepang dalam IJEPA terutama pada sektor perdagangan pulp dan kertas periode 2013-2015, seperti perkembangan ekspor-impor pulp dan kertas Indonesia-Jepang, hasil kerjasama IJEPA di sektor perdagangan khususnya industri pulp dan kertas, hambatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor pulp dan kertas Indonesia ke Jepang serta faktor-faktor penyebab penurunan ekspor pulp dan kertas Indonesia ke Jepang di bawah skema IJEPA. Kedua, data



sekunder yang berkaitan dengan kerjasama Indonesia-Jepang dalam skema IJEPA dan dampak tak terduga dari kerjasama IJEPA.

#### I.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara ke narasumber yang berkaitan dengan topik penelitian dan studi kepustakaan. Untuk mendapatkan data primer, Penulis akan melakukan wawancara kepada narasumber-narasumber dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia yang ahli di bidangnya untuk memperoleh data-data mengenai penyebab penurunan ekspor pulp dan kertas Indonesia ke Jepang di bawah skema IJEPA pada periode 2013-2015. Data primer dan data sekunder juga dilakukan dengan studi kepustakaan (*literature*) dengan cara mempelajari informasi-informasi berupa data atau dokumen mengenai perkembangan ekspor pulp dan kertas Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor pulp dan kertas Indonesia, serta dokumen-dokumen mengenai kerjasama Indonesia-Jepang dalam IJEPA khususnya di sektor perdagangan industri pulp dan kertas. Data-data tersebut diperoleh dari berbagai media seperti buku, jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang dapat diperoleh di media cetak yang tersedia di perpustakaan maupun media online.

#### I.8.5 Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan selanjutnya dikelola untuk kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan konsep yang berkaitan untuk mendukung sistematika jawaban dari pertanyaan penelitian. Penurunan ekspor pulp dan kertas Indonesia ke Jepang di bawah skema IJEPA yang seharusnya mengalami peningkatan karena penghapusan hambatan dagang kemudian dianalisa dengan konsep perdagangan bebas dan *free trade agreement* sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai penyebab penurunan ekspor pulp dan kertas Indonesia ke Jepang di bawah skema IJEPA.

## **I.9 Sistematika Penulisan**

Untuk memahami alur pemikiran penelitian ini, maka tulisan ini dibagi dalam bagian-bagian yang terdiri dari bab dan sub bab. Sistematika penulisan adalah membagi hasil penelitian ke dalam IV bab, yaitu:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Akan berisikan pendahuluan, pendahuluan ini berisikan sub-bab yakni latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Sub-bab lainnya adalah tinjauan pustaka dan kerangka teori. Sub-bab terakhir dalam bab ini adalah metodologi penelitian yang berisikan pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta sistematika penelitian.

### **BAB II            DINAMIKA PERDAGANGAN INDONESIA-JEPANG DALAM IJEPA PADA KOMODITAS PULP DAN KERTAS**

Dalam bab ini, dijelaskan mengenai kerjasama Indonesia-Jepang dalam skema IJEPA. Bagaimana progres kerjasama Indonesia-Jepang dalam IJEPA selama kerjasama ini berlangsung bersama manfaat yang didapatkan oleh kedua negara melalui kerjasama ini. Selain itu, dijelaskan pula mengenai kondisi ekspor pulp dan kertas Indonesia di bawah skema IJEPA.

### **BAB III            PENYEBAB PENURUNAN EKSPOR PULP DAN KERTAS INDONESIA KE JEPANG**

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai analisa faktor-faktor penyebab menurunnya ekspor pulp dan kertas Indonesia di bawah skema IJEPA, juga analisa progres dan manfaat yang ditunjukkan dari kerjasama antara Indonesia dan Jepang dalam IJEPA selama kerjasama ini berlangsung hingga tahun 2015 terutama di sektor industri pulp dan kertas. Selain itu, disini juga dibahas mengenai analisa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan

keuntungan bagi kedua negara, terutama bagi Indonesia. Semua dianalisa menggunakan konsep yang bersangkutan dengan topik.

#### BAB IV PENUTUP

Bab penutup ini berisikan tentang kesimpulan jawaban dari pokok permasalahan penelitian. Dalam bab ini, akan disimpulkan sebuah jawaban yang berasal dari analisis data yang diperoleh pada bab II dan bab III.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

